LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 5 Tahun 2007

TANGGAL : 16 Mei 2007

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 - 2009

A. UMUM

1. Latar Belakang.

Pembangunan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian Timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain serta mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan secara terpadu dan didukung oleh tersedianya pelayanan transportasi yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah provinsi tersebut. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan kendala terbesar bagi pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan rencana aksi pembangunan transportasi yang diharapkan mempercepat wilayah tersebut secara terpadu.

2. Kondisi Umum Wilayah, Penduduk, Dan Pelayanan Transportasi.

- a. Luas wilayah Papua seluruhnya 31,706,208 Km², dengan kondisi topografi yang berupa pegunungan di bagian tengah dan daerah dataran yang luas berupa rawa di wilayah pantai;
- b. Jumlah penduduk 1,945,854 jiwa dimana sebesar 70% penduduk hidup di pedesaan/kampung dan pegunungan tengah yang terpencil;
- c. Pulau Papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar;

d. Pelayanan ...

- 2 -

- d. Pelayanan transportasi yang masih terbatas baik jumlah maupun jangkauannya sehingga menimbulkan biaya hidup yang tinggi.
3. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah.
 - a. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan masyarakat di kampung;
 - c. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sejalan dengan kebijakan *the new deal policy for Papua*;
 - d. Pengembangan investasi yang kompetitif;
 - e. Penguatan hukum dan demokrasi.

B. TINJAUAN TATA RUANG DAN FOKUS PENGEMBANGAN

1. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang.

- a. Mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan Negara;
- b. Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- c. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- d. Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 % dari luas wilayah Papua;
- e. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan;

f. Menampung ...

- 3 -

- f. Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
- g. Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
- h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha;

- i. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah.
2. Pusat Pengembangan.
- Pusat pengembangan kawasan meliputi Sorong, Fakfak, Manokwari, Biak-Yapen, Timika, Merauke, Paniai-Waropen, Memberamo dan Jayapura-Wamena.
- a. Pusat Pengembangan Sorong: migas dan perikanan;
 - b. Pusat Pengembangan Fak-fak: migas, tanaman pangan dan pariwisata;
 - c. Pusat Pengembangan Manokwari: perkebunan, pertambangan dan pariwisata;
 - d. Pusat Pengembangan Biak- Yapen: pariwisata, perikanan dan industri;
 - e. Pusat Pengembangan Memberamo: energi, industri dan pariwisata;
 - f. Pusat Pengembangan Timika: pertambangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
 - g. Pusat Pengembangan Paniai-Waropen: perkebunan dan kehutanan;
 - h. Pusat Pengembangan Merauke: perkebunan, pertambangan dan tanaman pangan.

C. KEBIJAKAN TRANSPORTASI WILAYAH

1. Kebijakan Umum Transportasi.
 - a. Mengembangkan ...

- a. Mengembangkan transportasi keperintisan untuk wilayah pedalaman dan terpencil;

- b. Mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang;
 - c. Angkutan barang baik melalui kapal Ro-Ro maupun kapal konvensional;
 - d. Angkutan komoditas khusus dengan moda transportasi udara;
 - e. Memperhatikan aspek keterpaduan ekonomi, keadilan dan negara kesatuan.
2. Kebijakan Transportasi Darat.
- a. Mengembangkan jaringan transportasi;
 - b. Membuka akses daerah terisolir;
 - c. Meningkatkan aksesibilitas kawasan andalan;
 - d. Mendukung pemanfaatan potensi dan keunggulan wilayah;
 - e. Mendukung sistem integrasi antarmoda transportasi;
 - f. Meningkatkan keselamatan transportasi;
3. Kebijakan Transportasi Laut.
- a. Kelancaran koleksi, distribusi dan mobilitas;
 - b. Aksesibilitas antara kawasan andalan dan kawasan sub regional dan kawasan internasional;
 - c. Meningkatkan volume perdagangan melalui pelabuhan-pelabuhan;
 - d. Pengembangan jaringan prasarana pelabuhan laut dengan memperhatikan tatanan kepelabuhanan nasional;
 - e. Pengembangan jaringan lalu-lintas angkutan laut untuk menjangkau kota-kota di sepanjang garis pantai;
 - f. Pengembangan keselamatan dan keamanan pelayaran.
4. Kebijakan Transportasi Udara.
- a. Memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - b. Mendukung pengembangan potensi pariwisata;
 - c. Membuka dan memantapkan jalur internasional;

- d. Pengembangan jalur selatan yang masih terisolir dan terbatas prasarana jalan dan laut.

D. RENCANA ...

- 5 -

D. RENCANA PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

1. Transportasi Darat.

Pembangunan Transportasi Darat diprioritaskan pada :

- Pembangunan prasarana jalan dan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan 11 (sebelas) ruas jalan strategis yaitu ruas-ruas: Nabire-Wagete-Enarotali, Jayapura-Nimbrokang-Sarmi, Serui- Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Jayapura-Wamena-Mulia, Merauke-Tanah Merah-Waropko, Hamadi-Holtekamp-Skow (perbatasan dengan Negara Papua Nugini), Sorong-Klamono-Ayamuru-Maruni, Manokwari-Maruni-Mameh-Bintuni, Sorong-Makbon-Mega, Fakfak-Hurimber-Bomberay;
- Pembangunan fasilitas keselamatan transportasi jalan terkait dengan penanganan ruas-ruas lain dalam rangka membuka isolasi dan pengembangan daerah potensi baru;
- Pengembangan simpul jaringan transportasi jalan untuk terminal penumpang Tipe A, diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antarkota, antarprovinsi, dan lintas batas negara.

2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pembangunan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan diprioritaskan pada :

- Mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas

provinsi dengan interaksi kuat, meliputi : Sorong-Patani, Sorong-Wahai, Fak-fak-Wahai, Sorong-Biak, Dobo (Maluku)-Timika;

- Mengarahkan pengembangan pelayanan penyeberangan lintas kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi : Jeffman-Kalobo, Sorong-Seget, Seget-Mogem, Seget-Taminabua, Serui-Waren, Agats-Ewer, Biak-Numfor, Merauke-Atsy, Atsy-Asgon, Atsy-Agats, Merauke-Poo, Tanah Merah-Kepi.

3 Transportasi ...

- 6 -

3. Transportasi Laut.

Pembangunan Transportasi Laut diprioritaskan pada :

- Pembangunan Pelabuhan Nasional di Jayapura, Manokwari, Sorong dan Biak;
- Pembangunan Pelabuhan Arar di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan internasional.

4. Transportasi Udara.

Pembangunan Transportasi Udara diprioritaskan pada :

- Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Mopah-Merauke dan Sentani-Jayapura;
- Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Rendani-Manokwari, Frans Kaisepo-Biak, Nabire-Nabire, Timika-Timika, Wamena-Wamena, Domine Eduard Osok-Sorong, Waisai-Waisai;
- Bandar udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Torea-Fakfak, Utarom, Bintuni, Ijahabra, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan,

Teminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayawaru), Werur, Jeffman, Merdey, Kokonao, Akimuga, Ombano, Moanamani, Kebo, Waghete (Waghete Baru), Bilai, Bilorai, Enarotali, Sudjarwo Tjondronegoro, Numfor, Tanah Merah, Kepi, Mindip Tanah, Senggo, Bomakia, Ewer, Bade, Kamur, Kimam, Manggelum, Bokondini, Oksibil, Batom, Ilaga, Elelim, Illu, Karubaga, Kelila, Kiwirok, Tiom, Yuruf, Mulia, Mararena, Lereh, Molof, Dabra, Okaba, Senggeh, Ubrub, Waris, dan Klamono.

Sebaran lokasi dari rencana pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dapat dilihat pada Peta 1 dan Peta 2 sebagai berikut:

PUSAT ...

- 9 -

E. SASARAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2009.

Sasaran pembangunan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah: terlayannya kebutuhan transportasi di wilayah-wilayah terpencil, perbatasan dan pedesaan; mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya melalui pembangunan transportasi secara terpadu yang menghubungkan pusat-pusat pengembangan lokal, regional dan nasional serta kawasan strategis; mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan prasarana transportasi yang ada secara optimal.

F. KELEMBAGAAN.

Rencana aksi pembangunan transportasi merupakan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kelembagaan yang berada di pusat maupun di daerah yang memerlukan koordinasi secara terus menerus sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan efektif.

G. KEBUTUHAN PENDANAAN.

Untuk pelaksanaan Rencana Aksi ini diperlukan pendanaan yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO